



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 2 Juni 2016.
Pukul	: 19.00WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah SE.,MM. /Wk.Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Melanjutkan Agenda Rapat Kerja Tanggal 25 Mei 2016; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: 31 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.55WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Ferdiansyah SE.,MM. setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat (1) dan Pasal 246 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional 2016

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi bahwa pelaksanaan UN Tahun 2016 ada peningkatan perbaikan dari tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI mendukung langkah-langkah Kemendikbud RI untuk terus meningkatkan persiapan dan kesiapan pelaksanaan UNBK dan UNKP baik dari sisi sosialisasi, koordinasi, dan penyediaan sarana prasarana UN, maupun simulasi pelaksanaannya, termasuk pemanfaatan sarpras UNBK harus dioptimalkan untuk proses belajar mengajar.

2. Dalam rangka pelaksanaan UNBK lebih aman, lebih efisien, dan lebih fleksibel, serta untuk lebih meningkatkan integritas pelaksanaan UN di satuan pendidikan, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk:
 - a. melakukan sosialisasi yang intensif dan komprehensif terkait kriteria dan kesiapan satuan pendidikan mulai dari infrastruktur, sarana prasarana, SDM, jumlah peserta UNBK, agar satuan pendidikan tidak memaksakan untuk melaksanakan UNBK.
 - b. melakukan simulasi penyelenggaraan UNBK di setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio ketersediaan perangkat komputer dan server dengan jumlah siswa, ketersediaan jaringan internet, mebel, dan genset, serta alokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN untuk penyelenggaraan UNBK.
3. Mengingat Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) masih belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar para pemangku kepentingan, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik meliputi kriteria dan tolak ukur (*benchmark*) IIUN.
4. Dalam rangka untuk mengambil kebijakan UN selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk membuat matrik perbandingan keunggulan dan kelemahan terhadap UNBK dan UNKP.

B. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PIP Tahun 2016

1. Untuk meningkatkan daya serap Program Indonesia Pintar dengan sasaran 17 juta anak sekolah yang baru mencapai realisasi sasaran siswa sebesar 26% dan realisasi anggaran sebesar 17% per 31 Maret 2016, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud agar:
 - a. Pencetakan, pengamplopan, pengiriman KIP telah melalui klasifikasi dan verifikasi yang akurat.
 - b. Melakukan evaluasi sistem penyaluran dan pencairan PIP dengan bank penyalur.
 - c. Melibatkan dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, pihak-pihak yang bertugas di pelosok/daerah, dan lembaga lain dalam penyaluran dan pencairan PIP agar penyaluran dan pencairan mampu menjangkau dan mendekatkan ke seluruh penerima PIP.
2. Terkait belum terjangkanya 2 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah sebagai sasaran PIP, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI agar menindaklanjuti rekomendasi Panja PIP antara lain bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) dalam melakukan pendataan calon penerima PIP.
3. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan data tentang perbedaan antara penyaluran dan pencairan PIP Tahun 2015 dan Tahun 2016.

C. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) BPK RI Tahun 2015

Komisi X DPR RI mengapresiasi atas opini BPK WTP untuk Tahun Anggaran 2015, dan terkait Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera menyelesaikan tindak lanjut potensi kerugian negara yang belum sesuai dengan rekomendasi sebesar Rp.608.555.600,-

D. Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI MS IV TS 2015-2016

Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI pada reses masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016 ke Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

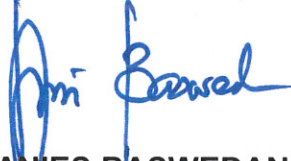
E. Lain-lain

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud untuk mengevaluasi Juklak dan Juknis DAK Pendidikan agar daya serap lebih optimal, rasional, sesuai dengan sasaran prioritas nasional yang memenuhi standar nasional pendidikan baik yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di usia sekolah agar program sekolah ramah anak dan program penanggulangan kekerasan di sekolah dapat bersinergi agar tingkat kekerasan tersebut dapat diminimalisir.
3. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan kepada Presiden RI supaya 5 (lima) fokus program pembangunan seharusnya dimulai dari pendidikan, kesehatan, energi, pangan, dan infrastruktur, bukan dimulai dari infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata yang selama ini menjadi fokus Pemerintah.
4. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemeristekdikti supaya sistem penerimaan calon mahasiswa baru melalui SNMPTN tahun-tahun mendatang tidak merugikan peserta didik.
5. Komisi X DPR RI mengapresiasi jawaban tertulis, namun Komisi X DPR RI masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dan data pendukung terhadap:
 - a. Guru yang telah dan yang belum melaksanakan pembelajaran tuntas per kabupaten dan per mata pelajaran; (halaman 19 – jawaban no.18A)
 - b. BSM Tahun Anggaran 2013 yang disetorkan kembali ke kas negara per tahun dan per kabupaten/kota. (halaman 20 – jawaban no.18B)
6. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menjabarkan secara rinci kegiatan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dimaksud pada Permendikbud No.23 Tahun 2015 agar sinkron dengan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
7. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memenuhi kebutuhan literasi dalam rangka implementasi Permendikbud No.23 Tahun 2015.

6. Terkait dengan pendidikan karakter, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menjabarkan secara rinci kegiatan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dimaksud pada Permendikbud No.23 Tahun 2015 agar sinkron dengan Permendikbud No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
7. Terkait implementasi Permendikbud No.23 Tahun 2015 dalam kegiatan membaca sebelum pembelajaran di satuan pendidikan, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk memenuhi kebutuhan literasi.

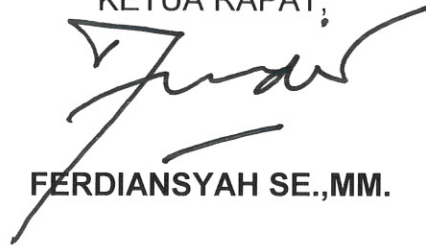
III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.40WIB
MENDIKBUD RI,



ANIES BASWEDAN

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH SE.,MM.